

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rasyid Hendarto, dkk. 2020. *Kapita Selekta Permasalahan Permasalahannya*. IDE Publishing.
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 2009, *Sistem Permasalahan Permasalahannya di Indonesia*, Binacipta, Bandung,
- Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. April 2020, “*Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*”, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM.
- Aminah Siti, dan Roikan, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur : Prenada Media Group (Divisi Kencana).
- Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo, 2005, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasalahan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehidupan Kriminal*. Jakarta: Kencana
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press.
- Dwija Priyatno. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Erlina Purnama Sari. 2009. *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Permasalahan Permasalahannya Terbuka*. Depok.
- Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Hessel Nogi S, Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, T. M. (1997). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Sinar Harapan: Jakarta
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*. Medan: Bangsa Press.
- Nonet, Phillipe. 2020. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media ISBN: 979-1305-09-9.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,. Bandung.
- Priyanto, D. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641).

### C. Jurnal Ilmiah

Budiyono, *“Fungsi Lembaga Pemasarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum di Eksekusi”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, Nomor 3 September 2009

Citra Anggraeni Puspitasari, *“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara”*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018,

Rara Julia Timbara Harahap, *“Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019”*, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2020

Trias Palupi Kurnianingrum, *“Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19”*, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020

### D. Website

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ( *Bagaimana cara mencegah penularan virus corona* )  
<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-corona>

Profil Lembaga pemasarakatan kelas IIA Rantauprapat  
<https://www.lapasrantauprapat.id/>

## **E. Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Rospitariani, S.H selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat